

**PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM MEWUJUDKAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA
TAHUN 2017**

**(STUDI DI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA
BERENCANA DAERAH KABUPATEN TOJO UNA-UNA)**

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Memperoleh Sarjana Ilmu Pemerintahan
pada Fakultas Ilmu Politik dan Ilmu Sosial
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Disusun Oleh :
Muh. Arga Budiman
20130520364

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

2018

NASKAH PUBLIKASI

PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM MEWUJUDKAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA
TAHUN 2017

(Studi di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah
Kabupaten Tojo Una-Una)



Dian Eka Rahmawati, S.IP., M.Si.

Mengetahui,


Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik
Dr. Titin Pufwaningsih, S.IP., M.Si


Ketua Program Studi Ilmu
Pemerintahan
Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si

**PENGUATAN KELEMBAGAAN DALAM MEWUJUDKAN
PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA
TAHUN 2017**

**(Studi di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
Kabupaten Tojo Una-Una)**

Muh. Arga Budiman, Dian Eka Rahmawati, S.IP., M.Si.

Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Muhammadargabudiman@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penguatan kelembagaan dalam mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una Tahun 2017 (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi serta studi kepustakaan. Analisis datanya menggunakan teknik deskriptif kualitatif melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang didapat menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan dalam mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una sudah berjalan baik, dilihat dari lima dimensi penguatan kelembagaan. Dimensi tersebut adalah struktur organisasi, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan kerjasama (network). Dari kelima dimensi ini, keuangan dan kerjasama yang paling menunjukkan keseriusan dalam penguatan kelembagaan dalam mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una. Ketiga dimensi lainnya masih memerlukan upaya tambahan untuk meningkatkan penguatan kelembagaan dalam rangka mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una.

Masih diperlukan beberapa hal untuk meningkatkan penguatan kelembagaan di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah seperti pembentukan Pokja dan Focal Point dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una dan perlunya pelaksanaan PPRG.

Kata Kunci : *Pengembangan Kapasitas, Kelembagaan, Pengarusutamaan Gender*

PENDAHULUAN

Kesetaraan gender telah menjadi isu utama dalam pembangunan berkelanjutan. Secara tegas upaya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia dituangkan dalam konsep Pengarusutamaan gender (PUG) yang diadopsi menjadi strategi pembangunan nasional yang disahkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional. Pengarusutamaan gender merupakan sebuah strategi pembangunan, bukan tujuan dan dirumuskan melalui pengintegrasian, pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Isu gender dalam pembangunan daerah tepat waktu dan tepat asas. Tepat waktu, karena Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 datang bersamaan dengan adanya pergeseran dari sentralistik ke desentralistik melalui otonomi daerah. Kesempatan besar itu sekaligus merupakan tantangan luar biasa bagi daerah, karena daerah diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan terobosan-terobosan melalui program/kegiatan pembangunan yang lebih cocok dengan keadaan dan aspirasi daerah.

Kabupaten Tojo Una-Una merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang sedang berusaha untuk mewujudkan pengarusutamaan gender dalam aspek pembangunan. Berdasarkan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Tojo Una-Una menempati Kuadran III. Artinya Kabupaten Tojo

Una-Una perlu bekerja lebih keras untuk meningkatkan kesetaraan gender. Sehingga sangat jelas bahwa kesetaraan gender merupakan isu utama dalam pembangunan Kabupaten Tojo Una-Una. Hal inipun menjadi perhatian khusus dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Tojo Una-Una yang menjadikan Pengarusutamaan gender sebagai visi dan misi mereka selama 5 tahun ke depan.

Misi mewujudkan pengarusutamaan gender yang diusung oleh Kabupaten Tojo Una-Una pada RPJMD 2016-2021 menempatkan kesetaraan gender pada posisi yang cukup strategis. Sasaran yang ingin dicapai berupa terwujudnya pengarusutamaan gender, meningkatnya peran perempuan dalam berbagai aspek, dan meningkatnya pemahaman tentang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

Komitmen Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam bidang pembangunan dipastikan akan mendapatkan kendala yang menghambat pelaksanaan pengarusutamaan gender dikarenakan pelaksanaannya yang masih baru . Guna meningkatkan tercapainya tujuan terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender, strategi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una adalah Penguatan Kelembagaan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimanakah Penguatan Kelembagaan dalam Mewujudkan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tojo Una-Una dan Faktor-Faktor yang mempengaruhinya.

METODE

Obyek Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una sebagai pelaksana kegiatan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una. Jenis data yang digunakan berupa data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui dokumentasi.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa metode studi pustaka, buku, dan referensi dari penelitian sebelumnya. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Penguatan Kelembagaan dalam mewujudkan Pengarusutamaan Gender

a. Struktur Organisasi

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una memiliki struktur yang menjalankan fungsi pengarusutamaan gender yang dilakukan oleh bidang pemberdayaan perempuan melalui sub bidang pengarusutamaan gender. . Belum ada Focal Point yang mengurus secara khusus di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang menjalankan fungsi pengarusutamaan gender sesuai pedoman teknis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menjalankan pengarusutamaan gender di daerah. Meskipun jika dilihat

secara fungsi dan tugasnya, Sub Bidang Pengarusutamaan Gender di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan Focal Point dalam pedoman teknis tersebut.

Peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dalam mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2017 sangat penting. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah merupakan pionier dalam membangun penguatan kelembagaan dalam mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2017.

b. Sumber Daya Manusia

Untuk menjalankan fungsi dalam mewujudkan pengarusutamaan gender, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah memiliki bidang pemberdayaan perempuan melalui sub bidang pengarusutamaan gender. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, bidang pemberdayaan perempuan memiliki 6 (enam) pegawai. Selain itu, sub bidang pengarusutamaan gender masih berisikan pegawai yang kurang memiliki pengetahuan tentang pengarusutamaan gender dikarenakan belum adanya kebijakan rekrutmen pegawai yang memiliki pengetahuan tentang pengarusutamaan gender.

Salah satu upaya untuk menanggulangi masalah sumber daya manusia dalam mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una adalah pengembangan kapasitas SDM dalam menjalankan fungsi

pengarusutamaan gender melalui sosialisasi. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia dalam mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una masih sangat minim karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang perwujudan pengarusutamaan gender.

c. Keuangan

Implementasi pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una yang dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah terdapat dalam 4 (empat) program dengan 5 (lima) kegiatan. . Komitmen ini tentunya juga didukung oleh pengalokasian anggaran dari APBD yang digunakan untuk mewujudkan pengarusutamaan gender.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 511.385.000,00- dari anggaran tahun 2017 yang dimiliki oleh Badan Pemberdayaan Perempuan sebesar Rp. 793.030.000,00- untuk mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una tahun 2017. Badan Pemberdayaan Perempuan telah mengalokasikan anggaran sekitar 64% dari total keseluruhan anggaran pada tahun 2017 yang menunjukkan adanya keseriusan dalam penguatan kelembagaan dimensi keuangan dalam mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una.

d. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan fungsi pengarusutamaan gender Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-

Una membutuhkan sarana dan prasarana yang terdiri dari alat-alat perkantoran seperti ruang kantor, komputer, AC, Kipas Angin Meja, alat-alat transportasi yaitu mobil dan motor, alat-alat komunikasi seperti, infocus, laptop, layar, dan alat penyimpanan seperti lemari arsip.

Belum ada sarana dan prasarana pengarusutamaan gender seperti ruang laktasi, ruang penitipan anak, dan rumah perlindungan korban kekerasan perempuan dan anak menjadikan sarana dan prasarana pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una masih belum lengkap.

e. Kerjasama

Dalam rangka mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah perlu melakukan kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama dengan pihak lain dapat membantu mempercepat tercapainya tujuan untuk mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una.

3 (tiga) kerjasama yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una untuk membantu menjalankan program-program mewujudkan pengarusutamaan gender pada tahun 2017. Kerjasama yang dilakukan antara lain:

- a. Kerjasama dengan seluruh OPD di Kabupaten Tojo Una-Una untuk mengikuti program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak pada kegiatan sosialisasi penguatan kelembagaan

pengarusutamaan gender dan anak melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender pada tahun 2017. Bentuk kerjasamanya adalah seluruh OPD diwajibkan mengirimkan perwakilan untuk mengikuti sosialisasi sehingga seluruh OPD dapat mengimplementasikan PPRG ke depannya.

- b. Kerjasama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Kepolisian, Kejaksaan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una-Una tentang pelayanan terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kerjasama ini dilakukan untuk menjalankan program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dengan kegiatan peningkatan perlindungan perempuan dengan masalah sosial. Setiap lembaga memiliki tugasnya masing-masing dalam kerjasama ini.
- c. Kerjasama yang ketiga yang dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una dengan organisasi-organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Tojo Una-Una. Kerjasama ini dilakukan untuk menjalankan program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan melalui kegiatan pembinaan terhadap organisasi perempuan. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tojo Una-Una akan memberikan pembinaan terhadap organisasi perempuan tentang perlunya keikutsertaan perempuan dalam pembangunan daerah.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

1. Faktor Pendukung

Kepemimpinan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penguatan kelembagaan dalam mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una. Hal ini terlihat dari komitmen Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una yang menjadikan pengarusutamaan gender menjadi salah satu misi dari penjabaran visi mereka selama 5 tahun yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tojo Una-Una periode 2016-2021.

Selain kepemimpinan, Komitmen bersama menjadi faktor pendukung, hal ini terlihat dari dukungan dari Bupati dan DPRD Kabupaten Tojo Una-Una melalui dukungan anggaran dan politis terhadap perwujudan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una. Seluruh OPD dan komponen masyarakat di Kabupaten Tojo Una-Una mau diajak untuk ikut berpartisipasi dalam program pengarusutamaan gender sehingga memudahkan penguatan kelembagaan.

2. Faktor Penghambat

Implementasi pengarusutamaan gender baru pertama kali dilaksanakan setelah menjadi salah satu misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2016-2021. Pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una masih pada tahap awal sehingga belum peraturan khusus yang mengatur tentang pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una dan

banyak istilah-istilah yang bahkan masih asing dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una.

Minimnya peraturan, pemahaman dan pengetahuan tentang pengarusutamaan gender telah menjadi kelemahan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una dalam upaya penguatan kelembagaan dalam mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una pada tahun 2017. Sehingga faktor penghambat dalam upaya mewujudkan pengarusutamaan gender adalah perlunya reformasi peraturan dan reformasi kelembagaan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una masih belum menjadi urusan seluruh instansi. Pengarusutamaan gender menjadi subordinat dan dijalankan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Penguatan kelembagaan adalah salah satu strategi yang dilakukan untuk mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una.

Terdapat 5 dimensi dalam penguatan kelembagaan yaitu, struktur organisasi, sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana, dan kerjasama (network). Dalam penguatan kelembagaan di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una telah dilakukan pada 5 dimensi meskipun masih memiliki banyak kekurangan. Hal ini dikarenakan

kebijakan pengarusutamaan gender masih tergolong baru di Kabupaten Tojo Una-Una.

Dari kelima dimensi ini, dimensi keuangan dan kerjasama yang paling menunjukkan keseriusan yang terealisasi melalui alokasi anggaran adanya bentuk kerjasama dengan pihak eksternal dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Tojo Una-Una. Sedangkan untuk dimensi organisasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana masih memerlukan upaya lebih untuk mewujudkan pengarusutamaan gender di Kabupaten Tojo Una-Una.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi. Ratnasari Jenivia. *Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) Kelembagaan Pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jombang*. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.1, No.3.
- Elizabeth Roosganda. (2007). *Pemberdayaan Wanita Mendukung Strategi PUG dalam Kebijakan Pembangunan Pertanian di Pedesaan*. Forum Penelitian Agro Ekonomi Volume 25 No.2 Desember 2007.
- Fakih Mansour. (2013). *Analisis Gender & Transformasi Sosial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Hardjanto Imam. (2006). *Pembangunan Kapasitas Lokal*, Malang. Program Pascasarjana Universitas Brawijaya.
- Hartanto Rima Vien Permata, Adriana Grahany Firdausy. (2010). *Evaluasi terhadap Pelaksanaan Inpres No.9 Tahun 2000 Tentang Kebijakan Pengarusutamaan Gender oleh Pemerintah Kota Surakarta*. Yustisia Edisi 81 September 2010.
- Keban Yeremias T. (2000). *“Good Governance dan Capacity building sebagai indikator utama dan Fokus Penilaian*. Jurnal Perencanaan Pembangunan. Jakarta. 2000.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2016. *Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2016*. CV. Lintas Khatulistiwa. Jakarta.

- Lampe Ilyas. (2009). *Perempuan dalam Pengelolaan Surat Kabar di Sulawesi Tengah (Studi Posisi dan Peran Perempuan dalam Media Cetak)*. Universitas Tadulako. Palu.
- Martiany Dina. (2012). “*Implementasi Pengarusutamaan Gender (Pug) Sebagai Strategi Pencapaian Kesetaraan Gender (Studi Di Provinsi Sumatera Utara Dan Jawa Tengah)*”. P3DI Sekretariat Jendral DPR-RI, 22 Desember.
- Milen Anelli. (2004). *Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas : Diterjemahkan secara bebas*. Pondok Pustaka Jogja. Yogyakarta.
- Morrison Tarrance. (2001). *Actionable Learning-A Handbook for Capacity Building Through Case Based Learning*. ADB Institute.
- Mosse Julia C. (2007). *Gender & Pembangunan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Mutiarin Dyah. (2014). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan : Penelusuran konsep dan teori*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Nugroho Riant, (2008). *Gender dan Strategi Pengarus-utamaannya di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Nugroho Riant. (2008). *Gender & Administrasi Publik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Pusadan Syamsiar. (2017). *Implementasi Kebijakan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Daerah Provinsi Sulawesi Tengah*. eJurnal katalogis, Volume 5 No.2 Februari 2017.
- Puspitawati Herien. (2009). *Pengarusutamaan Gender (PGU) Bidang Pendidikan dalam Menyongsong Era Globalisasi*. IPB. Bogor.
- Rani S. *Pengaruh Sikap Kesetaraan Gender Guru Terhadap Perilaku Pengimplementasian Kebijakan Pengarus-utamaan Gender (PUG) di SMP Kutoarjo*. Skripsi,. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ratih. (2008). *Perempuan dan Perannya dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial*. NATAPRAJA VOL.3, No.1.
- Riyadi S (2006). *Pengembangan Kapasitas Pemerintah Daerah Menuju Good Governance*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik. Volume 4 No.1. FIA UNBRAU.

- Satori Djam'an & Aan Komariyah. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung.
- Sudarto. (2002). *Metodologi Penelitian Filsafat*, Grafindo Persada. Jakarta.
- Suhendri. Tesis: *Penguatan Kelembagaan dalam Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muara Bungo Provinsi Jambi*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Susiana Sali. (2015). *Penerapan Konsep Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Dalam Pembangunan Daerah (Studi Di Provinsi Papua dan Provinsi DIY)*. P3DI Sekjen DPR RI, Juni.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tojo Una-Una, Indeks Pembangunan Manusia Kab/Kota di Prov. Sulawesi Tengah Tahun 2015.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. "Final Draft Strategi Penguatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi". (www.kemenppa.go.id/uploads/list)

Perundang-undangan

- Inpres No.9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008.
- Permendagri No. 15 Tahun 2008.
- PP No. 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- PP No.59 Tahun 2012 Tentang Kerangka Nasional Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Daerah Bab II, Pasal 6, ayat 1-2